



Agile Governance dalam Pembangunan Zona Integritas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Evi Nadhifah Prihatini^{1*}, Mayarni Mayarni², Hasim As'ari³

¹⁻³Program Magister Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia

Email: evinadhifah@staff.unri.ac.id¹, mayarni@lecturer.unri.ac.id², hasimasari@lecturer.unri.ac.id³

*Penulis Korespondensi: evinadhifah@staff.unri.ac.id

Abstract. *This study examines the implementation of Agile Governance in the development of the Integrity Zone at the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Riau. The study is motivated by the need for adaptive, responsive, and participatory governance to support bureaucratic reform and improve public service quality in higher education institutions. Despite ongoing efforts, the development of the Integrity Zone still faces challenges, including limited human resources, budget and facility constraints, inefficient administrative systems, and suboptimal digital service integration. This research employed a qualitative descriptive approach through observation, in-depth interviews, and documentation involving faculty leaders, the Integrity Zone team, educational staff, students, and alumni. The findings show that Agile Governance has been implemented through six indicators: good enough governance, business-driven, human-focused, quick wins, systematic and adaptive approach, and simple design and continuous refinement. Its implementation is reflected in administrative service digitalization, WhatsApp helpdesk services, consultation corners, the Complaint, Assistance, and Health Support Unit (P2K), service satisfaction surveys, integrity culture strengthening, and simplified service procedures. However, implementation remains uneven due to limited resources, inadequate digital integration, and organizational culture challenges. The study recommends strengthening digital service integration, enhancing human resource capacity, applying data-based service evaluations, and improving coordination and organizational culture to ensure sustainable and effective Integrity Zone development.*

Keywords: *Agile Governance; Bureaucratic Reform; Higher Education Governance; Integrity Zone; Public Service.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penerapan *Agile Governance* dalam pembangunan Zona Integritas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan tata kelola yang adaptif, responsif, dan partisipatif dalam mendukung reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan perguruan tinggi. Pembangunan Zona Integritas di FISIP Universitas Riau masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas dan anggaran, sistem administrasi yang belum sepenuhnya efisien, serta integrasi layanan digital yang belum optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pimpinan fakultas, tim Zona Integritas, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni sebagai pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Agile Governance* dalam pembangunan Zona Integritas di FISIP Universitas Riau telah mulai diterapkan melalui enam indikator utama, yaitu *good enough governance, business-driven, human-focused, quick wins, systematic and adaptive approach*, serta *simple design and continuous refinement*, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal dan merata. Penerapan tersebut terlihat melalui digitalisasi pelayanan administrasi, penggunaan WA helpdesk, pojok konsultasi, Unit Pojok Pengaduan dan Pendampingan dan Kesehatan (P2K), survei kepuasan layanan, penguatan budaya integritas, serta penyederhanaan prosedur pelayanan. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas dan anggaran, belum optimalnya integrasi sistem digital, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan integrasi layanan digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, evaluasi pelayanan berbasis data, serta penguatan koordinasi dan budaya organisasi agar pembangunan Zona Integritas dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan

Kata Kunci: *Agile Governance; Pelayanan Publik; Reformasi Birokrasi; Tata Kelola Perguruan Tinggi; Zona Integritas.*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan era digital yang berlangsung secara cepat telah mendorong terjadinya transformasi besar dalam tata kelola organisasi sektor publik, termasuk pada institusi

pendidikan tinggi. Perubahan lingkungan strategis yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan publik yang cepat, transparan, adaptif, dan berbasis teknologi menuntut organisasi pemerintah untuk mampu merespons perubahan secara lebih fleksibel dan inovatif. Dalam konteks tersebut, konsep *Agile Governance* menjadi pendekatan yang relevan dalam mendukung reformasi birokrasi modern karena menekankan kemampuan organisasi untuk beradaptasi secara cepat terhadap dinamika lingkungan internal maupun eksternal melalui kolaborasi, responsivitas, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengambilan keputusan yang berbasis kebutuhan pemangku kepentingan. Pendekatan ini dipandang penting dalam menciptakan tata kelola organisasi yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Salah satu bentuk implementasi reformasi birokrasi di Indonesia adalah pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pembangunan ZI merupakan strategi pemerintah dalam membangun budaya kerja birokrasi yang berintegritas, transparan, profesional, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Selain itu, pembangunan ZI di lingkungan perguruan tinggi juga diperkuat melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kehadiran kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ZI bukan hanya menjadi kebutuhan instansi pemerintahan pusat dan daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam tata kelola perguruan tinggi sebagai institusi pelayanan publik di bidang pendidikan.

Dalam konteks perguruan tinggi, pembangunan Zona Integritas memiliki peran strategis karena universitas tidak hanya menjalankan fungsi akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menciptakan budaya integritas bagi seluruh sivitas akademika. Penerapan ZI di lingkungan universitas bertujuan untuk memastikan tata kelola akademik dan non-akademik berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan bebas dari praktik maladministrasi. Pada level fakultas, implementasi ZI menjadi semakin penting karena fakultas merupakan unit yang berhubungan langsung dengan pelayanan pendidikan, administrasi akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh sebab itu,

keberhasilan pembangunan ZI di tingkat fakultas akan sangat menentukan kualitas tata kelola universitas secara keseluruhan.

Namun demikian, implementasi Zona Integritas di perguruan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pembangunan ZI pada banyak institusi pendidikan tinggi masih cenderung berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif dan kepatuhan formal terhadap indikator penilaian, sehingga belum sepenuhnya mampu menciptakan perubahan budaya organisasi yang berkelanjutan. Selain itu, pola tata kelola yang masih bersifat birokratis dan hierarkis menyebabkan organisasi sering mengalami keterlambatan dalam merespons kebutuhan layanan dan perubahan lingkungan strategis. Keterbatasan fleksibilitas organisasi, lemahnya kolaborasi lintas unit, resistensi terhadap perubahan budaya kerja, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi kendala utama dalam percepatan pembangunan ZI di lingkungan perguruan tinggi (Pratama & Mahardhika, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ZI memerlukan pendekatan tata kelola yang lebih adaptif dan responsif agar mampu menciptakan sistem pelayanan publik yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan.

Pendekatan *Agile Governance* menjadi relevan untuk menjawab berbagai tantangan tersebut karena menekankan prinsip adaptabilitas, kolaborasi, respons cepat, evaluasi berkelanjutan, dan pengambilan keputusan berbasis data. *Agile Governance* memungkinkan organisasi publik untuk bekerja secara lebih fleksibel melalui siklus umpan balik yang pendek, proses evaluasi yang berkelanjutan, serta inovasi layanan yang terus diperbaiki sesuai kebutuhan pengguna layanan. Menurut Weill dan Woerner (2018), *Agile Governance* merupakan model tata kelola yang mampu meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis melalui integrasi teknologi, kolaborasi lintas unit, dan penguatan kapasitas organisasi. Dalam sektor publik, penerapan *Agile Governance* juga dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi digital, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses tata kelola (Seftia & Meiwanda, 2021).

Dengan demikian, pendekatan *Agile Governance* menjadi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas di perguruan tinggi. Universitas Riau sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia turut melaksanakan pembangunan Zona Integritas dalam rangka memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan kampus. Salah satu unit yang aktif melaksanakan pembangunan ZI adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau. Pembangunan ZI di FISIP Universitas Riau dimulai sejak tahun 2023 melalui pembentukan Tim Kerja Zona Integritas berdasarkan

Surat Keputusan Dekan Nomor 77911/UN19.5.1.1.1/WS.01.07/2023 dan dilanjutkan pada tahun 2024 melalui pembentukan tim kerja baru berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor 21864/UN19.5.1.1.1/WS.01.07/2024. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam membangun tata kelola fakultas yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Secara empiris, pembangunan ZI di FISIP Universitas Riau menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan data penilaian Zona Integritas melalui sistem Inspirasi Dikti, nilai ZI FISIP mengalami peningkatan dari total nilai 69,08 pada tahun 2023 menjadi 94,90 pada tahun 2024. Selain itu, FISIP Universitas Riau juga memperoleh sertifikasi ISO 21001:2018 tentang Educational Organizations Management System (EOMS) yang menunjukkan bahwa sistem manajemen pendidikan yang diterapkan telah memenuhi standar internasional dalam pengelolaan layanan pendidikan tinggi. FISIP juga mengembangkan berbagai inovasi layanan seperti Mall Pelayanan Terpadu (MPT), Unit Anti Gratifikasi, Unit Percepatan MBKM, Green Campus, hingga FISIP Socializa Center sebagai bentuk penguatan pelayanan publik dan budaya integritas di lingkungan fakultas. Capaian tersebut menunjukkan bahwa FISIP memiliki komitmen kuat dalam mendukung pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.

Akan tetapi, di balik berbagai capaian tersebut, FISIP Universitas Riau masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar dalam implementasi Zona Integritas. Meskipun nilai evaluasi ZI mengalami peningkatan signifikan, FISIP hingga saat ini belum berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian administratif dengan implementasi tata kelola organisasi yang substantif. Salah satu permasalahan utama terletak pada rigiditas pengambilan keputusan dan koordinasi antarunit yang masih bersifat birokratis sehingga memperlambat respons organisasi terhadap kebutuhan stakeholders. Selain itu, pembangunan ZI masih sangat bergantung pada komitmen pimpinan dalam periode tertentu sehingga keberlanjutan program sering dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan dan perubahan prioritas organisasi. Situasi tersebut menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan secara konsisten dan adaptif dalam jangka panjang.

Permasalahan lain terlihat pada aspek pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Integrasi sistem informasi antarbagian masih terbatas sehingga proses pelayanan publik dan pengelolaan data belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien. Di sisi lain, tingkat literasi digital sebagian sumber daya manusia juga masih menjadi hambatan dalam mendukung digitalisasi layanan dan transparansi organisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola berbasis teknologi sebagai salah satu prinsip *Agile Governance* belum sepenuhnya

terimplementasi secara optimal di lingkungan FISIP Universitas Riau. Padahal, dalam pembangunan Zona Integritas, kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan sistem digital sangat penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta percepatan pelayanan publik.

Selain itu, resistensi budaya organisasi juga menjadi tantangan serius dalam implementasi ZI. Budaya kerja yang masih sektoral dan kurang kolaboratif menyebabkan inovasi layanan belum berjalan maksimal. *Agile Governance* menuntut adanya budaya kerja yang lincah, partisipatif, terbuka terhadap perubahan, dan berorientasi pada pemecahan masalah secara cepat. Namun dalam praktiknya, pola kerja birokratis yang kaku masih mendominasi sehingga memperlambat proses perubahan organisasi menuju tata kelola yang agile. Tidak hanya itu, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan ZI juga masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya berbasis data-driven decision making. Akibatnya, proses evaluasi lebih banyak berorientasi pada pemenuhan indikator formal dibandingkan pada pengukuran kualitas perubahan organisasi secara substantif.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian mengenai *Agile Governance* dalam pembangunan Zona Integritas di FISIP Universitas Riau menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini relevan karena berupaya menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Agile Governance* dapat mendukung percepatan pembangunan Zona Integritas melalui tata kelola yang lebih adaptif, responsif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian *Agile Governance* pada sektor pendidikan tinggi serta memberikan rekomendasi praktis bagi perguruan tinggi dalam memperkuat reformasi birokrasi dan pembangunan budaya integritas secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi publik, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam mendukung terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep *Good Governance*

Good governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi banyak orang di Indonesia, namun pemahaman tentang konsep *good governance* berbeda-beda, dan membayangkan bahwa dengan konsep *good governance* akan memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik, sehingga praktik korupsi menjadi berkurang dan pemerintah semakin peduli dengan kepentingan dan kebutuhan warganya. Perbaikan kinerja pelayanan publik dimilai

penting oleh semua *stakeholders*, yaitu pemerintah, warga pengguna, dan para pelaku pasar. Pelayanan public adalah ranah dari ketiga unsur *governance* melakukan interaksi yang sangat intensif, jika pemerintah dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, maka manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan para pelaku pasar. Adanya kepercayaan (*trust*) antara pemerintah dan unsure-unsur non pemerintah merupakan prasyarat yang sangat penting untuk menggalang dukungan yang luas bagi pengembangan praktik *good governance* di Indonesia. *Good governance* sering diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan istilah *civil society*. *Good governance* bisa juga didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi (pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat).

Penerapan *Good Governance* pada Sektor Publik

Pelayanan publik merupakan produksi birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu pelayanan *public* dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Berbeda dengan produk pelayanan berupa barang yang mudah dinilai kualitasnya, produk pelayanan berupa jasa tidak mudah untuk dinilai kualitasnya. Meskipun demikian antara pelayanan barang dan jasa seringkali bersifat komplementer atau saling melengkapi sehingga sulit dipisahkan. Suatu produk yang berupa pelayanan barang seringkali disertai dengan pelayanan jasa, misalnya penjualan mobil disertai dengan pelayanan jasa berupa garansi dan *service*.

Konsep Reformasi Birokrasi

Kata "*reform*" menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (1978) adalah "*make or become better by removing obstacles or putting right what is bad or wrong*". Rumusan ini memberikan gambaran bahwa reformasi adalah perubahan atau mengubah sesuatu untuk jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Tamin (2004) mengemukakan Reformasi ditujukan untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan *clean government*. Reformasi yang dimaksud diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian kearah yang lebih baik.

Konsep Dasar *Agile Governance* dalam Administrasi Publik

Dalam konteks *e-government*, *Agile Governance* telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan layanan publik dengan memungkinkan pemerintah merespons permintaan layanan yang cepat dan tepat waktu (Fangmann et al., 2020). Dengan pendekatan ini, pemerintah diharapkan dapat memperkecil risiko kegagalan proyek melalui evaluasi dan penyesuaian berkala yang dilakukan selama siklus hidup proyek. Adapun indikator-indikator

yang terdapat dalam teori *Agile Governance* yang dikemukakan oleh Luna dkk (Luna, A. J. H. de O dkk.,2015) yaitu: (1) *Good Enough Governance*; (2) *Business-Driven*; (3) *Human Focused*; (4) *Based on Quick Wins*; (5) *Systematic and Adaptive Approach*; serta (6) *Simple Design and Continuous Refinement*.

Aplikasi Agile dalam Administrasi Publik dan Tantangan Implementasi

Salah satu tantangan utama dalam penerapan *Agile* di sektor publik adalah penyesuaian struktur birokrasi tradisional yang cenderung hierarkis. Struktur ini sering kali menghambat fleksibilitas yang menjadi ciri khas metodologi *Agile*. Selain itu, sektor publik di berbagai negara juga menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur digital dan keterbatasan sumber daya manusia yang terbiasa dengan metode birokratis yang kaku (Abdullah et al., 2023).

Menurut studi oleh Lappi dan Aaltonen (2017), faktor-faktor seperti manajemen kontrak, pengendalian proyek, dan pengambilan keputusan berjenjang di sektor publik cenderung menciptakan ketegangan dalam penerapan metode *Agile*. Studi ini juga menemukan bahwa *Agile Governance* dapat berhasil jika pemerintah mampu menciptakan praktik-praktik tata kelola yang mendukung fleksibilitas tanpa mengorbankan transparansi dan akuntabilitas (Lappi & Aaltonen, 2017).

Manfaat dan Pengaruh Agile Governance terhadap Tata Kelola yang Baik

Penerapan *Agile Governance* dalam administrasi publik secara langsung mendukung prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Mergel (2018) mengungkapkan bahwa *Agile Governance* tidak hanya relevan bagi proyek-proyek teknologi tetapi juga dapat diterapkan dalam manajemen publik secara luas untuk meningkatkan adaptabilitas dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan penerapan *Agile*, pemerintah dapat menciptakan sistem tata kelola yang lebih dinamis dan responsif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan (Mergel et al., 2018).

Pendekatan Agile dalam Pengembangan Kebijakan Publik

Dalam pengembangan kebijakan publik, konsep *Agile Governance* mengadopsi prinsip *sprint* dan iterasi pendek untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau proyek dapat dievaluasi dan disesuaikan sebelum mencapai fase implementasi penuh. Parcell dan Holden (2013) menunjukkan bahwa *metode Agile sprint* membantu pemerintah mempercepat pengembangan kebijakan digital dengan memungkinkan kolaborasi antara berbagai badan dan mendorong *feedback* yang cepat untuk optimalisasi kebijakan yang sedang diuji (Parcell & Holden, 2013). Lebih lanjut, studi oleh Maulana et al. (2023) di pemerintahan Banyuwangi menunjukkan bahwa *Agile Governance* tidak hanya meningkatkan kecepatan dalam

penyusunan kebijakan tetapi juga memfasilitasi koordinasi lintas sektor yang lebih efektif, khususnya dalam menghadapi kebutuhan lokal yang beragam (Maulana et al., 2023).

Pengukuran Keberhasilan *Agile Governance* di Sektor Publik

Pengukuran keberhasilan penerapan *Agile Governance* di sektor publik menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikaji lebih lanjut. Poligadu dan Moloo (2014) mengembangkan kerangka kerja pengukuran yang dapat diterapkan dalam organisasi *Agile* untuk menilai efektivitas implementasi berdasarkan produktivitas tim, tingkat kolaborasi, dan waktu penyelesaian proyek. Kerangka ini menunjukkan bahwa pengukuran yang berbasis data sangat penting untuk menghindari pengambilan keputusan yang bersifat intuitif dan memastikan bahwa tujuan proyek dapat tercapai sesuai target (Poligadu & Moloo, 2014).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan *Agile Governance* dalam mendukung pembangunan Zona Integritas di FISIP UNRI. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan di Universitas Riau mengenai penerapan *Agile Governance*. Metode ini dipilih karena dapat menggali pandangan dan wawasan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk pimpinan, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang mengalami langsung dampak implementasi *Agile Governance*.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang berada di lingkungan Universitas Riau, Kota Pekanbaru. Fakultas ini merupakan salah satu unit akademik yang menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu di bidang sosial dan politik, serta memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang terus berupaya meningkatkan kualitas birokrasi internal, FISIP Universitas Riau menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji penerapan konsep *Agile Governance* dalam pembangunan Zona Integritas.

Informan penelitian yaitu orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi. Informan dipilih dalam proses riset secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria relevansi (keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman) terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti menetapkan informan kunci sesuai dengan bidangnya dan jumlah informan sesuai dengan kebutuhan data dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang digunakan secara komplementer untuk memperkuat validitas dan kedalaman analisis penelitian. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi lapangan terhadap informan yang berkaitan dengan implementasi Zona Integritas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, seperti pimpinan universitas dan fakultas, tim Zona Integritas, aparat pengawasan, staf administrasi, serta mahasiswa sebagai pengguna layanan. Pengumpulan data primer difokuskan pada aspek inisiasi Zona Integritas, keterlibatan civitas akademika, transparansi dan akuntabilitas, adaptabilitas dan responsivitas organisasi, efektivitas pengawasan, serta kualitas pelayanan publik dalam perspektif *Agile Governance*. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen resmi, seperti dokumen kebijakan Zona Integritas, Rencana Strategis (Renstra), Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan evaluasi, dokumen monitoring dan evaluasi, laporan audit, serta literatur ilmiah, regulasi, dan data digital dari website maupun sistem informasi universitas. Data sekunder tersebut digunakan untuk mendukung hasil wawancara dan observasi, melakukan triangulasi data, serta memberikan landasan teoritis dan normatif terhadap temuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pimpinan fakultas, staf administrasi, serta tim yang terlibat dalam penerapan *Agile Governance* di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi *Agile Governance*, tantangan yang dihadapi, serta pengaruhnya terhadap pembangunan Zona Integritas. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi partisipatif terhadap proses kerja dan aktivitas organisasi yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai agile, seperti kolaborasi, transparansi, fleksibilitas, dan responsivitas dalam pengambilan keputusan. Observasi ini bertujuan untuk memahami dinamika organisasi dan interaksi antarunit dalam mendukung keberhasilan Zona Integritas. Selanjutnya, analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai dokumen resmi, seperti kebijakan internal, prosedur kerja, laporan evaluasi, dan dokumen Zona Integritas untuk memperoleh data pendukung yang lebih objektif terkait implementasi *Agile Governance*. Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu guna menghasilkan data yang komprehensif dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen dianalisis menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*). Proses analisis dimulai dengan transkripsi hasil wawancara dan catatan observasi, kemudian dilanjutkan dengan proses coding untuk mengidentifikasi tema-tema yang berkaitan dengan penerapan *Agile Governance* dalam

pembangunan Zona Integritas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Proses coding dilakukan secara deduktif berdasarkan prinsip-prinsip *Agile Governance* serta secara induktif untuk menemukan tema baru yang muncul dari data lapangan. Selanjutnya, data diorganisasikan, dibaca secara mendalam, dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu, kemudian diinterpretasikan untuk melihat hubungan antara *Agile Governance* dan implementasi Zona Integritas. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, member checking kepada informan kunci, serta audit trail guna memastikan validitas dan keterlacakan proses analisis data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Agile Governance* Dalam Pembangunan Zona Integritas Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau

Penerapan *Agile Governance* dalam pembangunan Zona Integritas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau menunjukkan adanya upaya organisasi dalam membangun tata kelola yang adaptif, responsif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menganalisis implementasi *Agile Governance* berdasarkan enam indikator yang dikemukakan oleh Luna et al. (2015), yaitu Good Enough Governance, Business-Driven, Human Focused, Based on Quick Wins, Systematic and Adaptive Approach, serta Simple Design and Continuous Refinement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam indikator tersebut telah mulai diterapkan dalam pembangunan Zona Integritas di FISIP Universitas Riau, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun kultural.

Good Enough Governance

Dalam konteks pembangunan Zona Integritas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, penerapan prinsip *Agile Governance* mengusung konsep yang mirip, yaitu penyesuaian tata kelola dengan kebutuhan praktis di lapangan. *Agile Governance* mendorong fleksibilitas, kolaborasi, dan responsivitas yang tinggi dalam setiap tahapan pembangunan zona integritas. Hal ini memungkinkan adaptasi terhadap perubahan yang cepat, penyesuaian terhadap dinamika internal fakultas, serta pencapaian tujuan yang lebih efektif tanpa terjebak dalam prosedur birokratis yang terlalu kaku. Penerapan prinsip ini menunjukkan bahwa tata kelola yang luwes dan adaptif justru dapat memberikan dampak yang lebih positif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan di lingkungan fakultas.

Berikut ini adalah wawancara bersama Albertus Agus W, S.E., MM., C.Fr.A selaku Inspektur Investigasi Inspektorat Jendral Kemdikti saintek Universitas Riau mengenai

bagaimana penerapan tata kelola yang cukup memadai (*good enough governance*) dalam pengawasan pembangunan Zona Integritas di FISIP. “....Pengawasan dalam pembangunan Zona Integritas dilakukan melalui mekanisme yang realistis dan bertahap. Tugas utama kami adalah memproses aduan atau melakukan investigasi berdasarkan laporan khusus. Namun, penyelesaian kasus diharapkan terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme internal di perguruan tinggi. Jika tidak selesai, baru dilaporkan ke Inspektorat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tata kelola tidak harus sempurna sejak awal, tetapi cukup efektif untuk memastikan pengendalian berjalan. Selain itu, pembangunan Zona Integritas melibatkan seluruh unsur di fakultas, sehingga penguatan tata kelola dilakukan secara kolektif.....” (Wawancara bersama Albertus Agus W, S.E., MM., C.Fr.A selaku Inspektur Investigasi Inspektorat Jendral Kemdikti saintek Universitas Riau. Pada 3 Maret 2026).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dalam pembangunan Zona Integritas telah mengadopsi pendekatan yang pragmatis dan kontekstual. Pengawasan tidak ditempatkan sebagai instrumen yang kaku, tetapi sebagai proses bertahap yang menyesuaikan kapasitas organisasi. Penekanan pada penyelesaian kasus melalui mekanisme internal perguruan tinggi mencerminkan upaya memperkuat fungsi kontrol internal sebelum melibatkan otoritas eksternal. Pola ini memperlihatkan adanya desentralisasi pengawasan yang bertujuan meningkatkan kemandirian institusi dalam menjaga integritas. Dengan demikian, tata kelola yang diterapkan tidak berorientasi pada kesempurnaan prosedural, tetapi pada efektivitas pengendalian yang dapat langsung diimplementasikan.

Dari perspektif *Agile Governance*, pendekatan tersebut relevan dengan prinsip *good enough governance* dan *systematic and adaptive approach*. Tata kelola yang dianggap “cukup memadai” memungkinkan organisasi bergerak lebih cepat tanpa terhambat oleh tuntutan sistem yang ideal. Sementara itu, alur pengawasan yang dimulai dari internal hingga eskalasi ke Inspektorat menunjukkan adanya sistem yang terstruktur namun tetap fleksibel. Kemampuan untuk menyesuaikan mekanisme berdasarkan kondisi kasus mencerminkan karakter adaptif dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting dalam konteks pembangunan Zona Integritas yang menghadapi dinamika organisasi dan kompleksitas permasalahan yang beragam.

Selain itu, keterlibatan seluruh unsur fakultas dalam pembangunan Zona Integritas menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga kolektif dan partisipatif. Partisipasi civitas akademika memperkuat budaya integritas dan meningkatkan efektivitas pengendalian sosial dalam organisasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kolaboratif dalam *Agile Governance*, di mana keberhasilan tata kelola sangat bergantung pada sinergi antar aktor. Namun demikian, efektivitas model ini tetap bergantung pada konsistensi

komitmen internal dan kapasitas unit kerja dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tanpa penguatan pada aspek tersebut, mekanisme yang adaptif berpotensi kehilangan daya kontrolnya.

Business-Driven

Dalam konteks pembangunan Zona Integritas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, penerapan prinsip *Business-Driven Governance* terlihat dalam perencanaan dan pelaksanaan yang berfokus pada kebutuhan peningkatan integritas dan pelayanan publik yang transparan. Setiap kebijakan dalam pembangunan zona integritas ini dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang efisien serta dampak jangka panjang bagi fakultas dan masyarakat luas. Dengan demikian, pembangunan zona integritas di fakultas ini tidak hanya menjadi sebuah prosedur administratif, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. Berikut ini adalah wawancara bersama Angga Kesuma selaku Ketua Tim Bidang Keuangan dan BMN Universitas Riau mengenai bagaimana pengelolaan keuangan dan aset mendukung tujuan organisasi dalam pembangunan Zona Integritas.

“.....Pengelolaan keuangan dan aset diarahkan pada optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan PMK 202/PMK.05/2023, pemanfaatan aset bertujuan untuk memastikan tidak ada aset yang menganggur serta meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam kondisi efisiensi anggaran yang bersumber dari APBN, Universitas Riau diharapkan mampu memanfaatkan aset secara produktif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan keuangan tidak hanya administratif, tetapi berorientasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi bagi institusi dan negara.....” (Wawancara bersama Angga Kesuma selaku Ketua Tim Bidang Keuangan dan BMN Universitas Riau. Pada 3 Maret 2026).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset di Universitas Riau telah bergeser dari pendekatan administratif menuju pendekatan strategis yang berbasis optimalisasi sumber daya. Penekanan pada pemanfaatan aset sesuai PMK 202/PMK.05/2023 mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk menghindari idle asset dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam konteks ini, aset tidak lagi dipandang sebagai sumber daya pasif, tetapi sebagai instrumen produktif yang dapat menghasilkan nilai ekonomi. Hal ini mencerminkan orientasi kebijakan yang lebih rasional dan berbasis output, terutama dalam menghadapi keterbatasan anggaran dari APBN. Dari perspektif *Agile Governance*, temuan ini relevan dengan prinsip *business driven*, di mana setiap kebijakan dan keputusan diarahkan untuk mendukung tujuan utama organisasi. Optimalisasi aset menjadi strategi yang adaptif dalam merespons tekanan efisiensi anggaran,

sekaligus memperkuat kemandirian finansial institusi. Pendekatan ini juga menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan keuangan dan tujuan organisasi secara lebih luas, yaitu peningkatan kinerja dan keberlanjutan layanan publik. Dengan demikian, pengelolaan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai pendorong nilai tambah ekonomi.

Selain itu, orientasi pada produktivitas aset mencerminkan adanya upaya transformasi tata kelola menuju sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan. Pemanfaatan aset secara optimal berpotensi meningkatkan kapasitas institusi dalam mendukung program pembangunan Zona Integritas, khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan dukungan sistem yang terintegrasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pengelolaan aset dapat dilakukan secara profesional dan berkelanjutan. Tanpa dukungan tersebut, optimalisasi aset berisiko tidak mencapai potensi maksimal dalam menciptakan nilai tambah bagi institusi dan negara.

Human Focused

Dalam konteks pembangunan Zona Integritas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, penerapan prinsip *Human Focused* dapat dilihat dari desain kebijakan yang berfokus pada penguatan integritas dan kualitas layanan yang lebih personal. Setiap kebijakan dan program dalam pembangunan zona integritas ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi standar administratif, tetapi juga memastikan bahwa seluruh elemen civitas akademika terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan zona integritas dapat diukur tidak hanya dari aspek formal, tetapi juga dari tingkat kepuasan dan partisipasi aktif masyarakat akademik, menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Berikut ini adalah wawancara bersama Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau mengenai bagaimana pola kolaborasi antara pimpinan fakultas, program studi, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam pembangunan Zona Integritas.

“.....Pola kolaborasi dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan perguruan tinggi melibatkan partisipasi aktif dari seluruh unsur, dari tingkat pimpinan hingga mahasiswa, dengan peran dan tanggung jawab yang terstruktur. Kolaborasi ini bersifat hierarkis sekaligus horizontal, di mana setiap komponen memiliki peran spesifik dalam enam area perubahan utama (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik).....”

(Wawancara bersama Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pada 5 Maret 2026).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa Pola kolaborasi dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan perguruan tinggi melibatkan partisipasi aktif dari seluruh unsur yang ada, mulai dari pimpinan hingga mahasiswa, dengan peran dan tanggung jawab yang terstruktur dengan baik. Kolaborasi ini bersifat hierarkis sekaligus horizontal, yang berarti setiap level dalam organisasi, baik pimpinan, staf, maupun mahasiswa, berkontribusi secara terkoordinasi namun tetap saling mendukung. Hierarki memastikan bahwa ada struktur yang jelas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, sementara kolaborasi horizontal memberikan ruang bagi semua pihak untuk bekerja sama, bertukar ide, dan mengimplementasikan kebijakan dengan semangat gotong royong.

Dalam konteks ini, setiap komponen di perguruan tinggi memiliki peran spesifik yang sangat penting dalam menjalankan enam area perubahan utama dalam ZI, yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Misalnya, pimpinan perguruan tinggi berperan dalam mengarahkan dan mengawasi implementasi kebijakan, sementara staf akademik dan administrasi berperan dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut diterjemahkan dalam kegiatan operasional yang efisien dan tepat sasaran. Di sisi lain, mahasiswa turut berperan dalam memberikan masukan dan mengawasi kualitas pelayanan akademik serta partisipasi dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan integritas.

Kolaborasi yang terstruktur ini memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memahami tanggung jawabnya dan berkontribusi pada pencapaian tujuan ZI dengan cara yang terorganisir dan efektif. Melalui pembagian tugas yang jelas dan komunikasi yang antar level, perguruan tinggi dapat membangun budaya integritas yang kuat dan memastikan bahwa perubahan yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini juga akan mendukung terciptanya lingkungan yang bebas dari korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan perguruan tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi tersebut.

Based On Quick Wins

Dalam konteks pembangunan Zona Integritas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, penerapan strategi *Based on Quick Wins* terlihat jelas dalam langkah-langkah perbaikan yang dilakukan secara bertahap pada berbagai aspek tata kelola. Beberapa di

antaranya meliputi peningkatan prosedur administratif, penguatan transparansi, dan peningkatan efektivitas pelayanan kepada civitas akademika. Langkah-langkah kecil namun signifikan ini memberikan dampak nyata dalam jangka pendek, sekaligus memperkuat dasar bagi pembangunan zona integritas yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Berikut ini adalah wawancara bersama Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau mengenai bagaimana FISIP merespons perubahan regulasi/aturan yang berkaitan dengan pembangunan Zona Integritas.

“.....Orientasi pada Hasil Cepat (Quick Wins): *Agile Governance* fokus pada pencapaian hasil nyata dalam waktu singkat (quick wins). Dalam konteks ZI, ini dapat berupa keberhasilan awal dalam menyederhanakan prosedur pelayanan atau meningkatkan transparansi informasi, yang dapat memotivasi tim dan menunjukkan komitmen pimpinan.....” (Wawancara bersama Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pada 5 Maret 2026).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa *Agile Governance* menekankan orientasi pada hasil cepat (*quick wins*), yaitu pencapaian hasil nyata dalam waktu singkat yang dapat menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam suatu proyek atau inisiatif. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks pembangunan Zona Integritas (ZI), di mana pencapaian awal yang cepat dapat memberikan dampak positif yang besar dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dalam implementasi ZI, *quick wins* dapat berupa keberhasilan dalam menyederhanakan prosedur pelayanan, yang tidak hanya mempercepat proses tetapi juga meningkatkan efisiensi. Misalnya, perubahan prosedur administratif yang lebih sederhana atau penggunaan sistem informasi yang lebih transparan dapat langsung mengurangi birokrasi yang berbelit dan memudahkan akses informasi bagi publik.

Selain itu, meningkatkan transparansi informasi juga menjadi salah satu quick win yang penting dalam konteks ZI. Dengan menerapkan sistem yang lebih terbuka, seperti laporan publik yang lebih jelas dan mudah diakses, institusi dapat menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip *good governance*, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Pencapaian awal seperti ini dapat memotivasi tim internal untuk terus bekerja keras, serta memberikan bukti nyata bahwa perubahan yang dilakukan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi memberikan manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat dan civitas akademika.

Keberhasilan dalam mencapai *quick wins* juga dapat memperkuat dukungan dan kepercayaan terhadap pimpinan. Saat pimpinan menunjukkan komitmen untuk melakukan perubahan yang nyata dan terlihat hasilnya dalam waktu singkat, hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri dalam tim dan mendorong mereka untuk terus berkontribusi dalam pencapaian

tujuan yang lebih besar. Dengan cara ini, orientasi pada hasil cepat tidak hanya mempercepat implementasi ZI, tetapi juga menciptakan momentum yang dapat menjaga semangat tim dan mempercepat proses transformasi organisasi menuju Zona Integritas yang lebih baik.

Systematic and Adaptive Approach

Dalam konteks pembangunan Zona Integritas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, penerapan pendekatan *Systematic and Adaptive* tercermin dalam mekanisme tata kelola yang terstruktur dengan jelas, mulai dari perencanaan pembangunan zona integritas, pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi dampak yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, program ini tetap adaptif dengan memberikan ruang untuk penyesuaian kebijakan yang relevan dengan perubahan internal fakultas, dinamika kebutuhan civitas akademika, dan pemanfaatan teknologi terbaru.

Dengan pendekatan ini, pembangunan zona integritas di fakultas tidak hanya menjaga kualitas tata kelola yang sistematis, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan relevansi layanan yang responsif terhadap tantangan yang dihadapi. Berikut ini adalah wawancara bersama Albertus Agus W, S.E., MM., C.Fr.A selaku Inspektur Investigasi Inspektorat Jendral Kemdikti saintek Universitas Riau mengenai bagaimana pendekatan sistematis dan adaptif diterapkan dalam pengawasan dan penyelesaian kasus.

“.....Pendekatan sistematis dilakukan melalui alur penanganan laporan yang jelas, dimulai dari proses internal di perguruan tinggi hingga eskalasi ke Inspektorat jika diperlukan. Sementara itu, aspek adaptif terlihat dari fleksibilitas dalam menangani berbagai jenis kasus berdasarkan tingkat kompleksitasnya. Dengan mekanisme ini, organisasi dapat merespons permasalahan secara cepat tanpa mengabaikan prosedur yang berlaku.....” (Wawancara bersama Albertus Agus W, S.E., MM., C.Fr.A selaku Inspektur Investigasi Inspektorat Jendral Kemdikti saintek Universitas Riau. Pada 3 Maret 2026).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dalam pembangunan Zona Integritas telah dirancang secara terstruktur melalui alur penanganan laporan yang jelas dan berjenjang. Proses dimulai dari penyelesaian internal di perguruan tinggi sebelum dilakukan eskalasi ke Inspektorat apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan. Pola ini mencerminkan adanya sistem tata kelola yang terorganisasi dan memiliki standar prosedur yang pasti.

Kejelasan alur tersebut penting untuk memastikan setiap laporan ditangani secara konsisten, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga meminimalkan potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, aspek adaptif terlihat dari fleksibilitas dalam menangani kasus berdasarkan tingkat kompleksitasnya. Organisasi tidak

menerapkan pendekatan yang seragam, tetapi menyesuaikan metode penanganan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi. Hal ini menunjukkan adanya kemampuan organisasi untuk merespons dinamika secara cepat tanpa harus terjebak dalam prosedur yang kaku. Dalam perspektif *Agile Governance*, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *systematic and adaptive approach*, di mana tata kelola tetap berbasis sistem yang jelas namun mampu beradaptasi terhadap perubahan situasi.

Lebih lanjut, kombinasi antara sistem yang terstruktur dan fleksibilitas dalam implementasi memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengawasan. Organisasi mampu menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap prosedur dan kebutuhan akan respons cepat terhadap permasalahan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem pengawasan. Namun, efektivitas pendekatan ini tetap bergantung pada kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antar unit kerja. Tanpa dukungan tersebut, fleksibilitas yang diterapkan berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penanganan kasus.

Simple Design and Continuous Refinement

Dalam konteks pembangunan Zona Integritas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, pendekatan *Simple Design and Continuous Refinement* diterapkan melalui desain kebijakan dan program yang mudah dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan, serta mudah dipahami oleh civitas akademika. Selain itu, evaluasi rutin dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan mekanisme ini, pembangunan zona integritas di fakultas ini mampu menjaga kesederhanaan sambil terus meningkatkan kualitas tata kelola secara berkelanjutan, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh pihak terkait dan mendorong pencapaian tujuan integritas yang lebih baik. Berikut ini adalah wawancara bersama Dr. Agus Sunarya selaku Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemendikristek Universitas Riau mengenai bagaimana penyederhanaan sistem dan perbaikan berkelanjutan dilakukan dalam pengelolaan keuangan dan aset.

“.....Penyederhanaan dilakukan melalui optimalisasi prosedur pemanfaatan aset agar lebih efisien dan mudah diimplementasikan. Fokus utama adalah memastikan aset dapat dimanfaatkan secara produktif tanpa proses yang berbelit. Selain itu, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dan keuangan. Dengan demikian, sistem yang diterapkan tetap sederhana tetapi terus mengalami penyempurnaan sesuai kebutuhan organisasi.....” (Wawancara bersama Dr. Agus Sunarya selaku Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemendikristek Universitas Riau. Pada 3 Maret 2026).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa pengelolaan aset dan keuangan diarahkan pada penyederhanaan prosedur tanpa mengurangi substansi pengendalian. Optimalisasi prosedur pemanfaatan aset dilakukan untuk menghilangkan tahapan yang tidak efisien, sehingga proses menjadi lebih cepat dan mudah diimplementasikan. Fokus pada produktivitas aset menandakan pergeseran dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis hasil. Dengan demikian, aset tidak hanya dikelola sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai sumber daya strategis yang harus memberikan nilai guna optimal bagi organisasi.

Dari perspektif *Agile Governance*, pendekatan ini mencerminkan prinsip *simple design*, yaitu sistem yang dirancang secara sederhana namun tetap efektif. Penyederhanaan prosedur memungkinkan organisasi meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi hambatan birokrasi yang sering memperlambat proses layanan. Selain itu, adanya evaluasi berkelanjutan menunjukkan penerapan prinsip *continuous refinement*, di mana sistem tidak bersifat statis, tetapi terus diperbaiki berdasarkan kebutuhan dan pengalaman implementasi. Kombinasi kedua prinsip ini memperkuat kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan tanpa kehilangan arah kebijakan. Lebih lanjut, pendekatan ini berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas tata kelola keuangan dan aset, terutama dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Sistem yang sederhana memudahkan pemahaman bagi pelaksana dan meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada konsistensi evaluasi dan kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan sistem tersebut. Tanpa penguatan pada aspek tersebut, penyederhanaan prosedur berpotensi tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara sistem yang sederhana, evaluasi berkelanjutan, dan peningkatan kompetensi SDM agar pengelolaan aset dapat memberikan hasil yang maksimal.

Kendala yang Dihadapi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau dalam Pembangunan Zona Integritas

Secara umum, pembangunan Zona Integritas juga menghadapi berbagai tantangan baik dari faktor internal maupun eksternal organisasi. Tantangan internal meliputi resistensi terhadap perubahan budaya kerja, komitmen pimpinan dan aparatur yang belum merata, keterbatasan sistem pengawasan internal, serta keterbatasan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Sementara itu, tantangan eksternal dapat berasal dari meningkatnya ekspektasi pengguna layanan, dinamika kebijakan pemerintah, serta persepsi publik terhadap kualitas pelayanan birokrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas memerlukan komitmen organisasi yang kuat serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terus berkembang.

Ketidakstabilan Anggaran

Dalam implementasi *Agile Governance* pada pembangunan Zona Integritas, stabilitas anggaran merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. *Agile Governance* menekankan kemampuan organisasi untuk bergerak secara adaptif, cepat, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan organisasi maupun tuntutan pelayanan publik. Untuk mendukung terciptanya tata kelola yang *agile*, diperlukan dukungan sumber daya yang memadai, termasuk ketersediaan anggaran yang stabil dan berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi pagu anggaran yang dapat mempengaruhi efektivitas pembangunan Zona Integritas.

Berdasarkan data pagu PNBPN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun Anggaran 2023–2026, terlihat adanya perubahan jumlah anggaran setiap tahunnya. Pada tahun 2023 pagu anggaran sebesar Rp10.455.334.000, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp6.003.020.000 pada tahun 2024. Selanjutnya pada tahun 2025 anggaran meningkat kembali menjadi Rp8.844.817.000, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2026 menjadi Rp6.403.190.000. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan program Zona Integritas di FISIP Universitas Riau dihadapkan pada ketidakstabilan anggaran yang dapat mempengaruhi keberlangsungan program reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikut ini adalah wawancara bersama Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau mengenai pengaruh fluktuasi anggaran terhadap pembangunan Zona Integritas di FISIP Universitas Riau.

“.....Perubahan pagu anggaran setiap tahun tentu memberikan dampak terhadap pelaksanaan program Zona Integritas. Ketika anggaran mengalami penurunan, beberapa kegiatan pengembangan pelayanan, peningkatan fasilitas, maupun penguatan sistem pendukung harus disesuaikan kembali dengan kondisi keuangan yang tersedia. Hal tersebut menyebabkan proses implementasi program tidak selalu berjalan secara optimal sesuai target yang telah direncanakan.....” (Wawancara bersama Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pada 5 Maret 2026).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa fluktuasi anggaran menjadi salah satu kendala penting dalam pembangunan Zona Integritas di FISIP Universitas Riau. Penurunan pagu anggaran menyebabkan beberapa program strategis harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan sarana pendukung, serta optimalisasi sistem administrasi berbasis digital yang sebenarnya menjadi bagian penting dalam

mewujudkan tata kelola yang *agile* dan berintegritas. Dalam konsep *Agile Governance*, organisasi dituntut untuk mampu melakukan perubahan secara cepat dan berkelanjutan, namun keterbatasan anggaran dapat memperlambat proses adaptasi tersebut karena adanya pembatasan prioritas program dan efisiensi penggunaan dana.

Selain itu, ketidakstabilan anggaran juga mempengaruhi proses perencanaan jangka panjang dalam pembangunan Zona Integritas. Program-program yang telah dirancang sebelumnya sering kali harus mengalami penyesuaian akibat perubahan alokasi anggaran tahunan. Hal ini dapat menghambat kesinambungan program reformasi birokrasi yang membutuhkan konsistensi pelaksanaan dan evaluasi secara berkelanjutan. Ketika anggaran mengalami penurunan, fokus penggunaan dana cenderung diarahkan pada kebutuhan operasional utama, sehingga beberapa kegiatan pendukung Zona Integritas menjadi tertunda atau dikurangi pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak hanya dipengaruhi oleh komitmen organisasi, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam menjaga kestabilan dukungan anggaran.

Keterbatasan Sumber Daya

Dalam perancangan tata kelola pembangunan zona integritas, kesederhanaan menjadi prinsip yang sangat penting agar program dapat mudah dipahami, diakses, dan diterima oleh seluruh pihak terkait. Pendekatan *Simple Design and Continuous Refinement* menekankan pentingnya desain tata kelola yang sederhana namun tetap efektif, sehingga tidak menimbulkan hambatan birokrasi maupun teknis yang dapat memperlambat implementasi. Kesederhanaan desain ini tidak berarti mengurangi kualitas program, melainkan justru memudahkan pelaksanaan dan memperluas jangkauan manfaat bagi seluruh civitas akademika di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Berikut ini adalah wawancara bersama Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau mengenai apa dampak utama dari keterbatasan sumber daya yang dihadapi FISIP dalam pembangunan Zona Integritas.

“.....Keterbatasan sumber daya, baik tenaga kerja maupun fasilitas, menyebabkan kesulitan dalam memenuhi target dan standar kualitas pelayanan yang diinginkan dalam pembangunan Zona Integritas. Hal ini sering menghambat proses administrasi yang efisien dan mempengaruhi efektivitas program ZI yang kami jalankan.....” (Wawancara bersama Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pada 5 Maret 2026).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga kerja maupun fasilitas, merupakan kendala signifikan dalam pembangunan

Zona Integritas (ZI) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Kekurangan tenaga kerja membuat beban kerja staf yang ada semakin berat, sehingga kualitas dan kecepatan pelayanan menjadi terhambat. Selain itu, keterbatasan fasilitas juga turut memperburuk kondisi, karena kurangnya infrastruktur yang memadai dapat mengganggu kelancaran operasional yang diperlukan untuk mendukung program ZI. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ZI tidak hanya bergantung pada komitmen dan kebijakan, tetapi juga pada kapasitas sumber daya yang tersedia untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Dampak dari keterbatasan sumber daya ini terlihat jelas dalam proses administrasi yang seharusnya efisien. Pengelolaan administrasi yang lambat dan terkendala oleh kekurangan staf atau alat penunjang dapat memperlambat pelaksanaan program-program ZI, yang seharusnya dapat memberikan hasil yang cepat dan tepat waktu. Proses yang tidak efisien ini berisiko mengurangi efektivitas dari program ZI itu sendiri, yang tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pencapaian standar kualitas pelayanan yang diinginkan menjadi lebih sulit dicapai, meskipun terdapat niat dan usaha yang kuat dalam penerapannya.

Menghadapi tantangan tersebut, penting bagi unit kerja untuk mencari solusi yang efektif guna mengatasi keterbatasan yang ada. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban administrasi manual. Selain itu, perencanaan sumber daya manusia yang lebih matang dan peningkatan fasilitas yang memadai harus menjadi prioritas agar program ZI dapat berjalan dengan lebih baik. Tanpa adanya penambahan atau perbaikan sumber daya, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun fasilitas, sulit untuk mencapai tujuan Zona Integritas secara maksimal. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan implementasi ZI, penting bagi pihak terkait untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih optimal.

Sistem dan Prosedur yang Kurang Efisien

Dalam perancangan tata kelola pembangunan zona integritas, kesederhanaan menjadi prinsip yang sangat penting agar program dapat mudah dipahami, diakses, dan diterima oleh seluruh pihak terkait. Pendekatan *Simple Design and Continuous Refinement* menekankan pentingnya desain tata kelola yang sederhana namun tetap efektif, sehingga tidak menimbulkan hambatan birokrasi maupun teknis yang dapat memperlambat implementasi. Kesederhanaan desain ini tidak berarti mengurangi kualitas program, melainkan justru memudahkan pelaksanaan dan memperluas jangkauan manfaat bagi seluruh civitas akademika di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Berikut ini adalah wawancara bersama Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau mengenai apa saja kendala yang dihadapi FISIP terkait sistem dan prosedur dalam pembangunan Zona Integritas.

“.....Kendala utama yang kami hadapi terkait sistem dan prosedur adalah ketidakefisienan dalam proses administratif yang ada. Beberapa prosedur yang diterapkan masih bersifat manual dan memerlukan banyak tahapan, yang mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pelayanan. Hal ini menyebabkan adanya penundaan dalam proses pelayanan yang seharusnya dapat lebih cepat diselesaikan dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi dan otomatis....” (Wawancara bersama Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pada 5 Maret 2026).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi oleh unit kerja adalah ketidakefisienan dalam sistem dan prosedur administratif yang ada. Ketergantungan pada prosedur manual yang melibatkan banyak tahapan menghambat kecepatan dan efektivitas pelayanan. Dalam dunia yang semakin bergerak cepat, penggunaan sistem yang tidak terintegrasi dan otomatis dapat memperlambat proses administratif, membuatnya lebih rentan terhadap kesalahan manusia, dan mengurangi produktivitas staf. Ketika prosedur memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya, ini tidak hanya mengganggu efisiensi internal, tetapi juga mempengaruhi pengalaman pengguna layanan yang mengharapkan proses yang lebih cepat dan transparan.

Dampak dari ketidakefisienan ini sangat signifikan, terutama dalam konteks pembangunan Zona Integritas (ZI), yang mengutamakan efisiensi dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan civitas akademika. Penundaan dalam proses pelayanan, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat, akan memperburuk persepsi publik tentang kemampuan institusi dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang baik. Jika prosedur yang diterapkan tidak dapat dioptimalkan, maka sulit bagi institusi untuk mencapai tujuan Zona Integritas, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan.

Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperkenalkan sistem yang lebih terintegrasi dan otomatis. Mengganti prosedur manual dengan teknologi yang dapat memproses data secara otomatis akan mempercepat alur kerja dan mengurangi ketergantungan pada intervensi manusia, sehingga meningkatkan efisiensi. Sistem yang terintegrasi juga akan memudahkan komunikasi antar bagian dalam unit kerja, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meminimalkan kesalahan administratif yang sering muncul dalam sistem manual. Dengan adanya sistem yang lebih modern, unit kerja dapat

meningkatkan pelayanan, mempercepat proses, dan memastikan bahwa program Zona Integritas dapat diterapkan dengan lebih efektif.

Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam perancangan tata kelola pembangunan zona integritas, kesederhanaan menjadi prinsip yang sangat penting agar program dapat mudah dipahami, diakses, dan diterima oleh seluruh pihak terkait. Pendekatan *Simple Design and Continuous Refinement* menekankan pentingnya desain tata kelola yang sederhana namun tetap efektif, sehingga tidak menimbulkan hambatan birokrasi maupun teknis yang dapat memperlambat implementasi. Kesederhanaan desain ini tidak berarti mengurangi kualitas program, melainkan justru memudahkan pelaksanaan dan memperluas jangkauan manfaat bagi seluruh civitas akademika di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Berikut ini adalah wawancara bersama Dr. Auradian Marta, S.IP., MA Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau mengenai apa dampak dari kurangnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam implementasi program Zona Integritas di FISIP.

“.....Kurangnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menyebabkan staf dan tenaga kerja kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan efisien dan sesuai dengan standar Zona Integritas. Hal ini dapat menghambat implementasi program ZI, karena staf yang tidak terlatih mungkin kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi yang diharapkan dalam ZI. Tanpa pelatihan yang memadai, kualitas pelayanan akan menurun, dan staf tidak dapat memberikan kontribusi optimal dalam mencapai tujuan ZI....” (Wawancara bersama Dr. Auradian Marta, S.IP., MA Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pada 5 Maret 2026).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi kendala signifikan dalam implementasi Zona Integritas (ZI) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau. Pelatihan yang tidak memadai menyebabkan staf dan tenaga kerja tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam program ZI. Karena staf yang tidak terlatih lebih cenderung mengalami kesulitan dalam mengadaptasi prinsip-prinsip dasar seperti akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi, maka penerapan ZI menjadi lebih lambat dan kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan bukan hanya penting untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga untuk memastikan bahwa staf dapat mendukung tercapainya tujuan reformasi birokrasi yang ditargetkan dalam ZI.

Dampak langsung dari kurangnya pelatihan ini adalah penurunan kualitas pelayanan yang diberikan. Program ZI mengedepankan peningkatan pelayanan publik, tetapi jika staf tidak terlatih dengan baik, maka layanan yang diberikan kepada mahasiswa dan pengguna lainnya tidak akan optimal. Kesulitan dalam memahami dan menerapkan kebijakan atau prosedur baru dapat memperlambat pelayanan dan menurunkan tingkat kepuasan pengguna. Ini menjadi hambatan besar dalam pencapaian tujuan ZI yang mengutamakan pelayanan yang cepat, akuntabel, dan transparan. Kualitas pelayanan yang menurun akibat kurangnya keterampilan ini juga dapat berdampak pada citra fakultas sebagai institusi yang sedang berusaha menerapkan reformasi birokrasi yang bersih dan efisien.

Untuk memastikan keberhasilan program ZI, sangat penting bagi FISIP untuk segera mengatasi masalah kekurangan pelatihan dan pengembangan SDM ini. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan merancang program pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis tetapi juga pada penguatan pemahaman tentang prinsip-prinsip ZI, seperti akuntabilitas dan transparansi. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, atau pelatihan internal yang memberikan pemahaman lebih dalam mengenai standar dan prosedur ZI. Dengan peningkatan kapasitas SDM, staf di FISIP akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada, meningkatkan kualitas pelayanan, dan secara keseluruhan mendukung pencapaian tujuan ZI dengan lebih efektif.

Upaya yang Ditempuh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau dalam Pembangunan Zona Integritas

Dalam pembangunan Zona Integritas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, berbagai upaya terus dilakukan untuk mencapai tujuan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Upaya-upaya ini melibatkan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembenahan dalam setiap aspek manajerial dan operasional fakultas. Selain itu, penanaman nilai-nilai integritas kepada seluruh civitas akademika menjadi fokus utama dalam rangka menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Meskipun berbagai tantangan dihadapi, komitmen fakultas untuk mengimplementasikan perubahan terus diperkuat melalui pelatihan, sosialisasi, dan penguatan kebijakan yang mendukung zona integritas. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat budaya integritas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan sistem tata kelola yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Penyederhanaan Prosedur Administratif

Salah satu upaya yang dilakukan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dalam pembangunan Zona Integritas adalah menyederhanakan prosedur administratif yang masih terbilang panjang dan rumit. Proses yang terlalu berbelit dapat menghambat efisiensi pelayanan dan memperlambat pelaksanaan program-program Zona Integritas. Oleh karena itu, fakultas berfokus pada pemangkasan tahapan-tahapan yang tidak diperlukan, serta mengimplementasikan sistem digital yang lebih terintegrasi, untuk mempercepat proses administratif dan meningkatkan transparansi dalam setiap langkah yang diambil.

Upaya yang telah berjalan di Fakultas yaitu penyederhanaan prosedur administratif melalui pemangkasan tahapan yang tidak diperlukan serta percepatan alur layanan. Implementasi ini terlihat dari pengurangan birokrasi yang berbelit dan peningkatan efisiensi pelayanan. Berikut ini adalah wawancara bersama Dr. Baskoro Selaku Anggota Tata Kerja Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau mengenai apa alasan utama FISIP melakukan penyederhanaan prosedur administratif dalam pembangunan Zona Integritas.

“.....Penyederhanaan prosedur administratif dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan mempercepat proses yang sebelumnya terlalu berbelit-belit. Proses yang rumit dapat menghambat kelancaran implementasi program Zona Integritas, yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menyederhanakan prosedur, kami berharap dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan memudahkan civitas akademika dalam mengakses layanan....” (Wawancara bersama Dr. Baskoro Selaku Anggota Tata Kerja Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pada 4 Maret 2026).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa salah satu langkah yang diambil oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah penyederhanaan prosedur administratif. Penyederhanaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan, yang sebelumnya terhambat oleh proses yang terlalu panjang dan berbelit. Ketika prosedur administratif terlalu rumit, tidak hanya menghambat kecepatan pelayanan, tetapi juga bisa menurunkan kualitas layanan itu sendiri. Oleh karena itu, dengan menyederhanakan prosedur, fakultas berharap dapat memberikan layanan yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih responsif terhadap kebutuhan civitas akademika, sekaligus mendukung implementasi program ZI yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.

Penyederhanaan prosedur administratif sangat penting dalam konteks ZI karena tujuan utama dari program ini adalah menciptakan sistem birokrasi yang lebih bersih dan efisien.

Proses yang rumit dapat menciptakan peluang untuk terjadinya mal-administrasi atau bahkan praktik korupsi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ZI. Dengan menyederhanakan proses, fakultas tidak hanya mempercepat alur kerja, tetapi juga meningkatkan transparansi karena setiap tahapan dalam proses menjadi lebih jelas dan dapat dipantau dengan mudah. Hal ini memudahkan semua pihak untuk mengakses layanan dengan lebih cepat dan meminimalisir potensi penyalahgunaan yang sering terjadi dalam birokrasi yang tidak efisien.

Selain itu, menyederhanakan prosedur administratif juga memberikan dampak positif terhadap kepuasan civitas akademika. Dengan layanan yang lebih cepat dan mudah diakses, mahasiswa, dosen, dan staf tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk menjalani prosedur yang panjang dan membingungkan. Sebagai hasilnya, mereka dapat lebih fokus pada kegiatan akademik dan pengembangan diri, sementara waktu yang lebih efisien digunakan untuk tujuan yang lebih produktif. Secara keseluruhan, penyederhanaan prosedur ini mendukung tercapainya tujuan Zona Integritas, yaitu menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam setiap aspek pelayanan di lingkungan universitas. Selain langkah yang telah berjalan, fakultas juga sedang merintis penguatan sistem digital terintegrasi dalam proses administrasi. Digitalisasi ini mencakup pengajuan layanan, pengelolaan data, dan pemantauan proses secara real-time untuk meningkatkan transparansi dan akurasi.

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Upaya berikutnya adalah meningkatkan kapasitas dan keterampilan staf melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kurangnya pelatihan yang memadai menjadi kendala dalam mencapai tujuan Zona Integritas, karena staf yang tidak terlatih akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya dengan efisien dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berusaha untuk menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan yang dapat membekali staf dengan keterampilan teknis dan manajerial yang dibutuhkan dalam implementasi Zona Integritas, termasuk pengelolaan anggaran yang transparan, layanan publik yang efisien, dan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Fakultas telah menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan yang mencakup manajemen anggaran, pelayanan publik, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi. Program ini telah menjadi bagian dari strategi peningkatan kapasitas SDM. Berikut ini adalah wawancara bersama Dr. Auradian Marta, S.IP., MA Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau mengenai bagaimana FISIP meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka pembangunan Zona Integritas.

“.....Fakultas mengadakan pelatihan berkelanjutan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen anggaran, layanan publik yang efisien, hingga penerapan prinsip-prinsip

akuntabilitas dan transparansi. Pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja dan perubahan kebijakan yang ada, sehingga staf dapat beradaptasi dengan cepat terhadap tuntutan tugas mereka dalam konteks ZI....” (Wawancara bersama Dr. Auradian Marta, S.IP., MA Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pada 5 Maret 2026).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa upaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan yang mencakup berbagai aspek penting, seperti manajemen anggaran, layanan publik yang efisien, dan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa staf tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Zona Integritas (ZI) dalam tugas sehari-hari mereka. Dengan pelatihan yang komprehensif, staf akan memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan ZI, yang mengedepankan integritas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek layanan publik.

Pelatihan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja dan perubahan kebijakan yang ada memungkinkan fakultas untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi perkembangan yang cepat. Perubahan kebijakan dan tuntutan tugas yang terus berubah memerlukan staf yang dapat beradaptasi dengan cepat. Dengan pelatihan yang responsif terhadap perubahan ini, staf di fakultas dapat mengembangkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan aktual, memastikan bahwa mereka dapat terus memenuhi standar tinggi yang ditetapkan oleh program ZI. Hal ini juga memungkinkan fakultas untuk mempertahankan fleksibilitas dalam menjalankan berbagai kebijakan dan program yang mendukung reformasi birokrasi.

Selain itu, pelatihan berkelanjutan ini memberikan keuntungan ganda bagi fakultas, yakni memperkuat implementasi prinsip-prinsip ZI sekaligus meningkatkan motivasi dan kinerja staf. Ketika staf merasa memiliki keterampilan yang relevan dan dibekali dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan pekerjaan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih produktif. Pelatihan ini juga membangun rasa percaya diri di antara staf, yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara keseluruhan, pelatihan yang terencana dan berkelanjutan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan staf, tetapi juga mendukung keberhasilan jangka panjang dalam menerapkan Zona Integritas, dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Perlu dilakukan penguatan sistem evaluasi pasca-pelatihan serta pengembangan indikator kinerja berbasis kompetensi. Selain itu, integrasi pelatihan dengan sistem karier dan reward

juga direkomendasikan untuk meningkatkan motivasi dan keberlanjutan peningkatan kompetensi.

Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga berfokus pada penguatan sistem pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang diterapkan dalam rangka pembangunan Zona Integritas berjalan sesuai rencana. Hal ini dilakukan dengan membentuk mekanisme evaluasi yang melibatkan seluruh pihak terkait untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi yang tepat. Dengan pengawasan yang lebih baik, fakultas dapat memperbaiki proses yang kurang efisien, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Fakultas telah menerapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi melalui pelibatan berbagai pihak serta pelaksanaan rapat evaluasi secara rutin. Sistem ini mendukung identifikasi masalah dan perbaikan berkelanjutan. Berikut ini adalah wawancara bersama Dr. Mayarni, S.Sos., M.Si selaku Koordinator Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau mengenai mengapa penguatan sistem pengawasan dan evaluasi menjadi langkah penting dalam pembangunan Zona Integritas di FISIP.

“.....Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang diterapkan dalam pembangunan Zona Integritas berjalan sesuai dengan rencana. Tanpa pengawasan yang ketat, sulit untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas diterapkan dengan baik. Evaluasi juga memungkinkan kami untuk mendeteksi masalah sejak dini dan mengambil langkah perbaikan....” (Wawancara bersama Dr. Mayarni, S.Sos., M.Si selaku Koordinator Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pada 5 Maret 2026).

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan evaluasi dalam pembangunan Zona Integritas (ZI), yang merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk memantau pelaksanaan kebijakan secara real-time, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ZI, seperti transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan atau kesalahan dalam implementasi program bisa saja terjadi, yang pada akhirnya dapat merusak tujuan utama ZI, yakni menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani dengan efisien.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan secara sistematis juga memungkinkan fakultas untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas setiap kebijakan yang diterapkan. Evaluasi ini memberikan wawasan penting mengenai sejauh mana suatu program atau kebijakan memenuhi tujuannya, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Melalui evaluasi yang berkala, fakultas dapat mendeteksi masalah atau hambatan sejak dini, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil untuk memperbaiki proses atau kebijakan yang kurang berjalan dengan baik.

Ini akan memastikan bahwa program ZI tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga berkembang untuk mencapai hasil yang optimal. Dampak dari penguatan sistem pengawasan dan evaluasi ini adalah terciptanya budaya akuntabilitas dan transparansi yang lebih kuat dalam setiap lini organisasi. Ketika pengawasan dilakukan dengan baik, staf dan pihak terkait akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap tugas mereka, karena mereka tahu bahwa setiap langkah yang diambil akan dipantau dan dievaluasi. Selain itu, evaluasi yang jujur dan objektif akan memberi gambaran yang jelas tentang kinerja organisasi dan menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan pengawasan dan evaluasi tidak hanya berfungsi untuk memastikan kelancaran program ZI, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Upaya yang sedang dirintis yaitu pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan dan evaluasi sedang dikembangkan untuk meningkatkan akurasi data, transparansi, dan pemantauan program secara real-time.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulannya yaitu Penerapan *Agile Governance* dalam pembangunan Zona Integritas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau telah mulai diterapkan melalui indikator *good enough governance, business-driven, human-focused, quick wins, systematic and adaptive approach*, serta *simple design and continuous refinement*. Implementasi tersebut terlihat dari digitalisasi layanan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penyederhanaan prosedur administrasi, serta penguatan budaya integritas dan pelayanan publik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas dan anggaran, rendahnya integrasi sistem digital, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan.

Sarannya yaitu FISIP Universitas Riau perlu memperkuat implementasi *Agile Governance* melalui integrasi sistem digital antarunit, peningkatan efisiensi layanan administrasi, serta penguatan budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan dan

pengambilan keputusan berbasis data. Universitas juga perlu mendukung melalui penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan sistem monitoring berbasis data. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian *Agile Governance* secara lebih luas dan komparatif pada perguruan tinggi lain yang telah memperoleh predikat WBK atau WBBM.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, P. P., Raharjo, T., Hardian, B., & Simanungkalit, T. (2023). Challenges and best practices solution of agile project management in public sector: A systematic literature review. *JOIV: International Journal on Informatics Visualization*.
- Alfian, A., Rusli, Z., & Harapan Tua, R. F. S. (2021). Implementasi prinsip good governance aset negara. *Jurnal Kebijakan Publik*. <https://jkejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8238>
- Arliliwati, A., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2018). Evaluasi manajemen pelayanan publik. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 17(2). <https://doi.org/10.46730/jiana.v17i2.7887>
- Asrida, W. (2017). Pelayanan publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2015–2016. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(27). <https://doi.org/10.35967/jipn.v16i27.5796>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Darumurti, A., Atmojo, M. E., Saputro, M. N. C. E., & Perdana, V. A. (2023). *Agile Governance* dalam peningkatan kapasitas pelayanan publik pasca pandemi COVID-19 (Studi kasus inovasi Bantul Sehat Ekonomi Karo Jamu). *Perspektif*, 12(3), 952–960. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i3.9526>
- Dewi, L. P. R., & Suardana, I. (2023). Reflections of *Agile Governance* in public services in the digital age. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen pelayanan publik: Peduli inklusif dan kolaborasi*. UGM Press.
- Fangmann, J., Looks, H., Thomaschewski, J., & Schön, E.-M. (2020). Agile transformation in e-government projects. In *2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24–34.
- Kvale, S. (2007). *Doing interviews*. SAGE Publications.
- Lappi, T., & Aaltonen, K. (2017). Project governance in public sector agile software projects. *International Journal of Managing Projects in Business*, 10, 263–294.
- Luna, A. J. H. de O., Kruchten, P., & Moura, H. P. de. (2015). *Agile Governance* theory: Conceptual development. In D. M. G. Sakata (Ed.), *12th International Conference on Management of Technology and Information Systems*.

- Malik, I., Wahid, N., & Busri. (2023). Implementasi *Agile Governance* pada reformasi birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1). <https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.134>
- Marta, A., Ferlan, M., & Amin, R. M. (2024). Adaptive governance model: Development of green villages based on the policy of Siak Green Regency. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 24(1). <https://doi.org/10.35967/njip.v24i1.870>
- Maulana, A., Puspitaningtyas, Z., Suryawati, D., & Murdyastuti, A. (2023). Local government acceleration towards *Agile Governance*. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*.
- Mazidah, A. L., Astuti, F., Romdhoni, M. F., Ichsana, M., Nur, & Juana, T. (2019). Analisis dynamic governance pada program layanan Layad Rawat di Dinas Kesehatan Kota Bandung. *Jurnal Spirit Publik*, 14, 154–163.
- Mergel, I. (2020). Agile: A new way of governing. *Public Administration Review*.
- Mishenina, H., & Pavlenko, D. (2020). Features and prospects of agile application in the activity of public authorities in terms of Ukraine's public administration transformations.
- Nastasya, M., Yuliani, F., & Hasim As'ari. (2023). Pelaksanaan digital governance pada pelayanan administrasi kependudukan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial (JAPS)*, 6(1). <https://doi.org/10.46730/japs.v6i1.221>
- Osborne, D. (2010). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison Wesley.